



CROSSCUTTING

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Crosscutting ialah konsep yang mencakup berbagai isu yang berhubungan dengan lebih dari satu bidang dalam waktu yang sama di lokasi yang berbeda

CROSSCUTTING DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Kuala Tungkal, 22 - 9 - 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPAPIO, SE
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19680116 199703 1 002

Pemetaan Isu Strategis Lintas Urusan (Crosscutting) dan Keterlibatan Perangkat Daerah

No	Isu/Lintas Urusan	Deskripsi Isu	OPD Terkait (Kolaborasi)	Contoh Bentuk Sinergi
1	Degradasi kualitas lingkungan hidup	Terjadi kerusakan & pencemaran air, udara, serta penurunan tutupan lahan akibat aktivitas manusia dan lemahnya pengawasan lingkungan.	DLH (lead), Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Camat/Desa, DPMPTSP, Dinas Kehutanan	Pemantauan kualitas air dan udara, rehabilitasi lahan kritis, pengawasan industri, penguatan kebijakan tata ruang berwawasan lingkungan.
2	Belum optimalnya pengelolaan sampah	Pengurangan dan penanganan sampah belum berjalan efektif karena keterbatasan infrastruktur dan partisipasi masyarakat yang rendah.	DLH (lead), Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Koperasi/UMKM, DPMPTSP, Camat/Desa	Pembangunan TPS3R, program bank sampah, gerakan pilah sampah dari sumber, inovasi daur ulang dan ekonomi sirkular.
3	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan	Masyarakat belum memiliki budaya sadar lingkungan, sehingga partisipasi dalam pengelolaan sampah, konservasi, dan kepatuhan aturan lingkungan masih rendah.	DLH (lead), Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, DPMD, TP PKK, Organisasi masyarakat	Edukasi lingkungan di sekolah, kampanye "Hijaukan Bumi", pelatihan komunitas hijau, lomba kampung bersih dan sekolah adiwiyata.
4	Meningkatnya dampak perubahan iklim	Perubahan iklim meningkatkan risiko bencana (banjir, kekeringan, abrasi) dan menurunkan kualitas ekosistem serta kesehatan masyarakat.	DLH (lead), BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, BMKG daerah, Dinas Perikanan	Program Kampung Iklim (ProKlim), konservasi DAS, penghijauan, sistem peringatan dini bencana, adaptasi berbasis masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki mandat utama dalam menjaga, memulihkan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya, DLH tidak dapat bekerja secara parsial, karena isu-isu lingkungan bersifat lintas sektor dan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai perangkat daerah. Identifikasi terhadap isu lintas urusan (crosscutting issues) menunjukkan bahwa terdapat empat isu besar yang menjadi fokus penanganan bersama antara DLH dengan perangkat daerah lain.

1. Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah adalah **degradasi kualitas lingkungan hidup** yang semakin meningkat. Kondisi ini ditandai dengan tingginya tingkat pencemaran air di sungai dan badan air akibat pembuangan limbah rumah tangga maupun industri tanpa pengolahan yang memadai. Selain itu, kualitas udara di beberapa wilayah menunjukkan penurunan akibat peningkatan aktivitas transportasi, pembakaran terbuka, dan emisi dari kegiatan industri. Di sisi lain, penurunan tutupan lahan hijau, terutama di kawasan padat penduduk dan area pertanian produktif, mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem.

Untuk mengatasi persoalan ini, **DLH berperan sebagai leading sector**, dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Camat/Desa, DPMPTSP, Dinas Kehutanan. Kolaborasi diarahkan pada kegiatan pemantauan kualitas air dan udara secara berkala, rehabilitasi lahan kritis, pengendalian limbah industri, serta penerapan kebijakan tata ruang yang berwawasan lingkungan. Selain itu, penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas pengawasan di lapangan menjadi langkah strategis untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah

Isu kedua yang dihadapi DLH adalah **belum optimalnya pengelolaan sampah**, baik dari sisi pengurangan maupun penanganan. Masalah ini bersumber dari keterbatasan infrastruktur persampahan, belum meratanya layanan pengangkutan, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumber. Volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi masyarakat, sementara kemampuan daerah dalam mengelola sampah secara terpadu masih terbatas.

Dalam menghadapi tantangan ini, DLH bekerja sama dengan Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Koperasi/UMKM, DPMPTSP, serta pemerintah kecamatan dan desa. Bentuk sinergi yang dilakukan mencakup pembangunan dan revitalisasi **TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle)**, pengembangan **bank sampah** di tingkat komunitas, serta penguatan **ekonomi sirkular** melalui kegiatan daur ulang dan pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai ekonomi seperti kompos dan kerajinan daur ulang. DLH juga berperan dalam mendorong kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan penyusunan roadmap pengelolaan sampah daerah yang berorientasi pada target *Zero Waste*.

3. Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pelestarian Lingkungan

Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan menjadi isu ketiga yang perlu mendapatkan perhatian serius. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, melakukan konservasi sumber daya alam, serta mematuhi peraturan terkait pengelolaan lingkungan. Akibatnya, perilaku membuang sampah sembarangan, pembakaran terbuka, hingga penebangan pohon tanpa izin masih sering ditemukan. Rendahnya partisipasi publik ini berdampak langsung pada efektivitas program-program lingkungan yang dijalankan pemerintah.

Untuk itu, DLH perlu memperkuat kolaborasi dengan **Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, DPMD**, serta organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan. Sinergi dapat diwujudkan melalui program **edukasi lingkungan sejak dini**, integrasi materi lingkungan dalam kurikulum sekolah, serta **kampanye sosial “Hijaukan Bumi”** dan kegiatan **sekolah atau kampung adiwiyata**. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan komunitas hijau, lomba kebersihan, serta kegiatan gotong royong lingkungan juga menjadi langkah strategis dalam menumbuhkan budaya sadar lingkungan yang berkelanjutan.

4. Meningkatnya Dampak Perubahan Iklim

Isu keempat yang semakin mendesak adalah **meningkatnya dampak perubahan iklim** yang memengaruhi stabilitas ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu udara, serta meningkatnya intensitas kejadian ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan abrasi pantai, menunjukkan bahwa daerah semakin rentan terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga pada sektor kesehatan, pertanian, serta infrastruktur.

Dalam menghadapi tantangan ini, DLH berperan aktif bersama **BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, dan BMKG daerah** dalam menyusun dan mengimplementasikan program **Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim**. Contoh bentuk sinergi konkret adalah pelaksanaan **Program Kampung Iklim (ProKlim)**, penghijauan dan rehabilitasi **daerah aliran sungai (DAS)**, penguatan sistem **drainase kota**, serta pengembangan **sistem peringatan dini bencana**. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perubahan iklim dilakukan melalui edukasi dan pelatihan adaptasi berbasis masyarakat.

Kesimpulan

Keempat isu *crosscutting* ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan secara sektoral, tetapi harus melalui pendekatan kolaboratif dan terintegrasi lintas perangkat daerah. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai penggerak utama (*lead sector*) dalam membangun sinergi antara kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan dukungan OPD lain, dunia usaha, serta masyarakat, diharapkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan, guna mewujudkan daerah yang bersih, sehat, dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Kuala Tungkal, 22 . 9 . 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO, SE
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19680116 199703 1 002